

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
BIDANG INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN KESEHATAN
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DEDI SETIADI
NIM. 1201015219

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Prodi Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah
Universitas Mulawarman
Email : dedidanger84@gmail.com**

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of government spending infrastructure sector of education, health and the economic growth in Kutai Kartanegara years 2005-2014. Government spending infrastructure sector represented by government spending variable road sector, the government sector education infrastructure spending, government spending and the health sector is basically an investment to economic growth. Effect on development of these sector can not have a direct impact but require a period to be able to feel the impact. There is a time lag when the government issued a construction budget or statespending for these three sector with the impact of the policy. The we need a study using time series is long enough. Research using time series will help see the effect of government spending on these sector to economic growth. Government investment in education, health and infrastructure will lead to improved quality of human capital and physical infrastructure, this will also spur economic investment. Economic investment to further affect economic growth, because of the large capital available for development.

The analysis model is the Error Correction Model (ECM), this model is expected to explain the behavior of short-term and long-term. In addition, this model is able to find solutions to the problem of time series variables are not stationary in econometrics.

Keywords : Economic growth, government spending, education, health, infrastructure, Error Correction Model.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diikuti dengan serangkaian kebijakan baik di bidang pemerintahan maupun di bidang keuangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, desentralisasi otonomi daerah merupakan bagian dari salah satu kebijakan kemandirian suatu daerah atau bangsa dalam mengurus daerahnya masing-masing.

Otonomi daerah dapat menjadikan perubahan secara komprehensif terhadap kehidupan bangsa Indonesia yang sangat heterogen dari berbagai suku, ras, agama dan hal-hal lain yang saling berkaitan dengannya. Seiring dengan itu pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri agar daerah yang bersangkutan dapat mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut. Pemerintah dalam hal ini mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah yang telah diatur dalam RAPBD yang dianggarkan setiap tahun dalam hal ini pengaturan

pengeluaran pemerintah terhadap hal-hal yang dianggap perlu dalam pembangunan, salah satunya adalah pembangunan di bidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting dalam perekonomian setiap daerah. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang turut serta dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah adalah kebijakan fiskal, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Keynes dalam The Liang Gie (2004:57), menetapkan 2 anggaran yang akan digunakan bagi kinerja perekonomian merupakan hal yang penting bagi suatu negara (Gie, 2004). Sebagai pemegang otoritas fiskal, pemerintah banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah harus menggerakkan perekonomian. Kecenderungan di dalam sisi pengeluaran mencerminkan suatu yang penting dari sisi penerimaan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam menjalin

terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan sendiri yakni dengan upaya pertumbuhan ekonomi., menuju kemandirian keuangan daerah.

Dalam otonomi daerah konsep keterpaduan pembangunan ekonomi menjadi semakin penting,. Secara ideal program pembangunan bisa menjadi input bagi program pembangunan yang lain, dimana program sektoral bersifat ego-sektor semakin kurang populer karena diduga dapat merugikan sektor lain.

Dalam perekonomian yang lebih luas, terjadi hubungan antar kegiatan ekonomi dan menunjukan keterkaitan yang semakin kuat dan dinamis. Bahkan jenis-jenis kegiatan baru bermunculan untuk mengisi kekosongan mata rantai disuatu sektor dan tidak mungkin dapat dicapai tanpa dukungan sektor lainnya. Pertumbuhan pendudukan baik secara alamiah maupun migrasi disuatu daerah membawa dampak social yang multikomplek. Pertumbuhan yang terlalu cepat dan drastis juga bisa berakibat kurang baik pada perekonomian suatu daerah, akan tetapi dapat pula membawa suatu perubahan struktur ekonomi dan percepatan ekonomi, manakala penduduk yang ada dapat memberikan kontribusinya pada daerah itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dimana elemen-elemen yang memacu Pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, skill dan teknologi yang digunakan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu peningkatan pendapatan per kapita dengan jalan mengelola kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu sektor penting untuk pembangunan suatu daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan komponen masyarakatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal peningkatan pembangunan dibidang ekonomi. Upaya pemerintah dibidang ekonomi, terlihat dari keberanian pemerintah mengeluarkan anggaran bagi pembangunan dibidang ekonomi dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini sangat mendukung pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah daerah dapat terlaksana karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah, keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan

kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (Tangkilisan 2005:71) Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta penerimaan pembangunan.

Salah satu kebijakan pemerintah yang turut serta berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merinci tentang penerimaan dan pengeluaran Daerah yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun (Suparmoko,2000:67) Menurut Keynes menetapkan 2 anggaran yang akan digunakan bagi kinerja perekonomian merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Sebagai pemegang otoritas fiskal, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah harus menggerakkan perekonomian nasional. Kecenderungan disisi pengeluaran pemerintah mencerminkan suatu yang penting dari sisi penerimaan.

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi.

Terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efisien.

Pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB (Product Domestic Regional Bruto) . Diharapkan dengan adanya keadilan dan pembagian sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut adalah perkembangan PDRB dan laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Perkembangan PDRB ADH Konstan 2000 dan Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2014**

Tahun	PDRB ADH Konstan 2000 (Juta rupiah)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2005	28.008.486	6.650.958	2,67	11,58
2006	27.299.950	7.437.449	2,53	11,83
2007	26.203.219	8.148.206	4,02	9,56
2008	27.247.692	8.678.089	4,67	6,50
2009	28.051.628	9.054.530	2,27	4,34
2010	28.960.186	9.726.201	3,24	7,42
2011	29.416.531	12.544.628	0,85	19,39
2012	30.313.943	14.841.146	3,05	18,31
2013	30.525.264	15.955.636	0,70	7,51
2014	28.282.334	82.836.260	1,35	3,5
Jumlah	284.489.233	175.873.103	12,25	99,94

Sumber/Source : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara/*BPS-Statistics
Kutai Kartanegara Regency*

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dibidang keuangan daerah. Pada saat krisis ekonomi pemerintah harus menjalankan kebijakan defisit anggaran dalam mengelola keuangan daerah. Defisit anggaran mengalami peningkatan karena meningkatnya jumlah pengeluaran pada pos pembayaran cicilan dan bunga utang. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah harus menggerakkan perekonomian. Kecenderungan didalam sisi pengeluaran pemerintah mencerminkan sesuatu yang penting dari sisi penerimaan. Peningkatan pengeluaran pemerintah tersebut memberikan pengaruh bagi perekonomian daerah.

Keadaan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sebelum krisis menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dan pada krisis pengeluaran pemerintah pun semakin meningkat terutama pada pos pembayaran cicilan dan bunga utang. Pembayaran cicilan dan bunga utang tersebut termasuk kedalam pengeluaran rutin, sehingga dapat terlihat bahwa perubahan pengeluaran rutin sebelum krisis ekonomi mengalami peningkatan yang cukup besar. Besarnya pengeluaran pemerintah disati titik tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pemerintah, sehingga hal tersebut membuat

pemerintah mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran negara. Oleh karena keterbatasan anggaran yang dimiliki, pemerintah melakukan pinjaman baru untuk menutup cicilan pinjaman yang lama atau jatuh tempo.

Pengeluaran pemerintah atas infrastruktur, pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Efek pembangunan pada tiga sektor tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat time lag ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja daerah untuk ketiga sektor tersebut dengan dampak kebijakan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan runtun waktu (Time Series) cukup panjang. Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada tiga sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah dalam infrastruktur, pendidikan dan kesehatan akan menyebabkan peningkatan kualitas modal manusia dan prasarana fisik, hal ini juga akan memacu investasi ekonomi. Investasi ekonomi selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena banyaknya modal yang tersedia untuk pembangunan.

Penelitian terdahulu masih memperdebatkan hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hubungan yang terjadi pada penelitian terdahulu terkait dengan perbedaan kondisi tiap-tiap negara yang diteliti. Studi yang dilakukan oleh Donald N dan Shuanglin (1993) menemukan tingkat pertumbuhan pengeluaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya pengeluaran pemerintah atas kesejahteraan berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pertumbuhan pengeluaran pertahanan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Antonio Estache (2007) meneliti hubungan antara pengeluaran public dengan pertumbuhan ekonomi pada negara kaya. Hasilnya adalah hubungan negatif yang kuat antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Namun hubungan negatif tersebut hanya dapat diterapkan untuk negara kaya dengan sektor public yang luas. Suleiman Abu-Daber dan Amers (2004) mengamati pengeluaran pemerintah untuk sektor sipil dan militer serta pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan arah kausalitas diantara variabel tersebut dinegara Mesir, Israel dan Syria. Dan hasilnya pengeluaran militer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran sipil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Israel dan Mesir.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat positif dan negative tergantung dari negara yang menjadi sample penelitian, hal ini dijelaskan dalam penelitian oleh Marta Pascual dan Santiago Alvarez-Garla (2006). Di Indonesia Jamzy Zodik (2006) meneliti hubungan

pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional dan hasilnya adalah pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian-penelitian diatas menunjukkan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki kesimpulan yang beragam.

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Berikut adalah tabel 1.2 Proporsi Pengeluaran Pemerintah sektor infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan tahun 2005-2014.

Tabel 1.2 Proporsi Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur Jalan, Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2005-2014 (Dalam Persen).

Tahun	Proporsi Pengeluaran Pemerintah (%)		
	Infrastruktur Jalan (Jalan Aspal)	Pendidikan (Pembangunan Gedung)	Kesehatan (Jaminan Kesehatan)
2005	12,14	6,89	2,17
2006	14,25	8,06	2,82
2007	14,03	10,12	2,89
2008	17,56	7,45	2,78
2009	15,12	9,19	2,56
2010	24,86	6,03	2,82
2011	25,11	11,44	4,55
2012	27,96	13,36	6,15
2013	31,08	5,70	6,20
2014	34,89	6,09	7,76

Sumber/Source : BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara/BAPPEDA Kutai Kartanegara Regency

Dari uraian diatas terdapat berbagai fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dan analisis serta pembahasan dengan judul : *“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur Jalan, Pendidikan, Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kutai Kartanegara”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur jalan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara ?
2. Apakah pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara ?
3. Apakah pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan APBD.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah atas fungsi infrastruktur, pendidikan dan kesehatan terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi pembaca pada umumnya bagi mahasiswa pada khususnya.

METODE PENELITIAN

2.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

2.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur jalan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan.

2.1.2 Definisi Operasional

Adapun batas pengertian dan definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi (Y) merupakan suatu proses pertumbuhan output per kapita jangka panjang apabila ada kecenderungan output perkapita naikyng bersumber dari proses intern perekonomian (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari luar atau bersifat sementara. Hal ini berarti Pertumbuhan ekonomi bersifat *Self Generating*, artinya proses Pertumbuhan itu sendiri menghasilkan kekuatan atau momentum bagi kelanjutan Pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya. Indikator variabel Pertumbuhan ini adalah Product Domestic Regional Bruto yang dihitung Atas Dasar Harga Konstan (ADH Konstan). Data variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan referensi 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Variabel tersebut dihitung dalam satuan Milyar Rupiah.
2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk bidang infrastruktur jalan yang dilihat dari jumlah pengeluaran pembangunan fisik untuk infrastruktur jalan aspal pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 yang dihitung dalam satuan milyar rupiah.
3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan yang dilihat dari jumlah pengeluaran pembangunan fisik untuk pembangunan gedung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2014 yang dihitung dalam satuan Milyar Rupiah.

4. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan yang dilihat dari jumlah pengeluaran pembangunan non-fisik untuk jaminan kesehatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2005-2014. Variabel tersebut dihitung dalam satuan Milyar Rupiah.

3.2 Jenis dan Rincian Data yang diperlukan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan mempunyai sifat berkala (*time series*) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2005 sampai tahun 2014
2. Data Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur Jalan dari tahun 2005 sampai 2014
3. Data Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dari tahun 2005 sampai 2014
4. Data Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dari tahun 2005 sampai 2014

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan dan dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini.

3.4. Metode Analisis

Dalam ilmu ekonomi ketergantungan suatu variabel (variabel terikat) terhadap variabel lain (variabel bebas) tidak hanya bersifat seketika. Seperti sering suatu variabel beraksi terhadap variabel lain dengan suatu selang waktu “lag”. Pengeluaran pemerintah merupakan suatu investasi yang tidak dapat langsung seketika mempengaruhi output. Dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah yang berupa konsumsi dan pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi cenderung sama, yaitu akan habis dibelanjakan sehingga tidak berpengaruh terhadap output. Namun demikian dalam jangka panjang investasi pemerintah memiliki efek terhadap peningkatan output. Hal itu dikarenakan kelambanan atau “lag”.

Menurut Gurajati (2003) alasan terjadinya kelambanan atau *lag* dalam suatu analisis adalah sebagai berikut :

1. Alasan Psikologis
Unsur kebiasaan menyebabkan seseorang tidak mengubah pola konsumsinya dengan seketika karena adanya perubahan harga atau peningkatan pendapatan.

Hal ini disebabkan karena suatu proses perubahan tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan (*immediatel disutility*). Reaksi terhadap peningkatan pendapatan tergantung pada peningkatan pendapatan tersebut tetap ataukah sementara.

2. Alasan Teknologis

Penurunan harga modal relatif terhadap tenaga kerja yang bersifat sementara tidak akan menyebabkan perusahaan mendistribusi modal terhadap tenaga kerja

3. Alasan Kelembagaan

Kewajiban kontrak dapat mencegah perusahaan-perusahaan melakukan perubahan dari suatu sumber tenaga kerja atau bahan mentah kesumber lain. Misalnya seseorang menanamkan dananya pada rekening tabungan dengan jangka waktu 1 tahun, 3 tahun atau 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tersebut sebenarnya berada dalam kondisi *locked in* (terperangkap karena paling tidak selama satu tahun, orang tersebut tidak dapat mengalihkan dananya kedalam bentuk lain).

Dinamika perkembangan variabel-variabel ekonomi juga dapat diamati dari perspektif antar waktu dimana fluktuasi dan dinamika variabel-variabel tersebut naik turun secara siklikal, seasonal, karena pengaruh tren waktu, maupun karena adanya guncangan (*shock*). Model-model struktural yang digunakan untuk menjelaskan dinamika variabel-variabel ekonomi tersebut dalam hubungannya dengan runtun waktu dengan model-model dinamis (*dynamic model*). Namun sering kali teori ekoomi saja tidak cukup untuk menjelaskan spesifikasi hubungan antar variabel yang dikonstruksikan dalam persamaan simultan dinamis. Terlebih lagi estimasi dan statistic inferensi menjadi sulit untuk dilakukan ketika spesifikasi model ekonometri melibatkan variabel-variabel endogen baik disisi kiri persamaan maupun sisikan persamaan. Kesulitan ini menyebabkan munculnya alternatif untuk menspesifikasikan hubungan antar variabel didalam model non struktural

Adanya masalah tersebut mendorong alternatif lain yang sering disebut model non struktural. Pendekatan ini mencari hubungan antara macam-macam variabel yang diinginkan. Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan model Error Correction Model (ECM). Dengan model ini diharapkan dapat menjelaskan perilaku jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara matematis model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = f (J_t, P_t, K_t) \dots \dots \dots (3.5)$$

Dimana :

J_t : Pengeluaran pemerintah bidang jalan/tahun

P_t : Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan/tahun

Kt : Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan/tahun

Sehingga persamaannya adalah :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 J + \alpha_2 P + \alpha_3 K + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.6)$$

Model ini dibentuk untuk melihat pengaruh secara bersamaan variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur jalan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

Model estimasi yang digunakan dalam analisis ini atas : model *Error Correction Model (ECM)* dan *Ordinary Least Square (OLS)*. Melalui model ECM diharapkan dapat dijelaskan perilaku jangka pendek maupun jangka panjang keterkaitan antar variabel-variabel yang diamati. ECM memberikan pendekatan yang berhubungan dengan masalah variabel runtun waktu yang tidak stasioner dan korelasi lancing (Thomas RL, dalam Sri Isnawati, 2002). Model koreksi kesalahan mampu meliputi banyak variabel dalam menganalisis fenomena jangka panjang serta konsistensi model empiris dengan teori ekonomi.

3.4.1 Error Correction Model (ECM)

Error correction model dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa pelaku ekonomi menghadapi adanya ketidakseimbangan dan konteks bahwa fenomena yang diinginkan oleh pelaku ekonomi belum tentu sama dengan apa yang senyatanya dan perlunya yang bersangkutan melakukan penyesuaian sebagai akibat adanya perbedaan fenomena actual yang dihadapi antar waktu. Selanjutnya dengan menggunakan ECM dapat dianalisis secara teoritik yang empiric apakah model yang dihasilkan konsisten dengan teori atau tidak (Sri Isnawati, 2002). Alasan digunakan ECM dalam penelitian ini (Insukindro, 1993) :

1. ECM yang merupakan suatu autoregresif, mengikutsertakan pertimbangan pengaruh lag dalam analisisnya sehingga model ini sesuai diterapkan dalam penelitian yang menggunakan data *time series*
2. Kemampuan ECM meliputi banyak variabel Dalam menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek dan jangka panjang
3. Pendekatan ini telah diterapkan di Indonesia dan mampu menjelaskan pengalaman-pengalaman ekonomi di Indonesia dan penulis mencoba menerapkannya di dalam penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Variabel-variabel tak bebas pada periode tertentu yang diteliti tidak ditentukan oleh variasi variabel bebas pada periode yang sama tetapi juga variasinya dimasa lalu

dan dimasa yang akan datang. Dengan demikian model yang selaras dengan kenyataan tersebut adalah model linier dinamis.

Anggaplah bahwa pertumbuhan ekonomi yang diinginkan (*exchange rate* = Y^*) dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah atas jalan (J), listrik (L), pendidikan (P) dan kesehatan (K) dinyatakan dalam hubungan jangka panjang atau keseimbangan (*long-run or equilibrium relationship*) sebagai berikut :

$$Y_t^* = \alpha_0 + \alpha_1 J + \alpha_2 P + \alpha_3 K \dots \dots \dots (3.7)$$

Jika Y_t^* berada pada titik keseimbangan terhadap J_t , P_t , dan K_t berarti persamaan diatas dipenuhi. Namun dalam sistem ekonomi pada umumnya jarang sekali terjadi keseimbangan seperti yang diinginkan, sehingga bila Y_t^* mempunyai nilai yang berbeda dengan nilai keseimbangan maka terjadilah perbedaan nilai antara sisi kanan dan sisi kiri persamaan 3.8 sebesar :

$$De = Y_t^* - \alpha_0 - \alpha_1 J - \alpha_2 P - \alpha_3 K \dots \dots \dots (3.8)$$

Nilai (De) ini dikenal sebagai kesalahan ketidakseimbangan atau *dis-equilibrium error*. Kemudian dilakukan perumusan fungsi biaya kuadrat tunggal sebagai berikut :

$$C_t = b_1(Y_t - Y_t^*) + b_2\{(Y_t - Y_{t-1}) - f_1(Z_t - Z_{t-1})\}^2 \dots \dots \dots (3.9)$$

Y_t adalah pertumbuhan ekonomi periode t , Z_t merupakan vector variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dianggap dipengaruhi secara linier oleh pengeluaran pendidikan P_t , pengeluaran kesehatan K_t , pengeluaran jalan J_t . b_1 dan b_2 merupakan vector baris yang memberikan bobot kepada elemen $Z_t - Z_{t-1}$.

Kemudian dengan meminimalisasikan persamaan (3.7) terhadap Y_t dan mensubstitusikan Z_t sebagai fungsi dari J_t , P_t dan K_t akan diperoleh :

$$Y_t = g_0 + g_1 J_t + g_2 P_t + g_3 K_t + g_4 J_{t-1} + g_5 P_{t-1} + g_6 K_{t-1} + g_7 Y_{t-1}$$

Dimana : $g_0 = a_0 b$, $g_1 = a_1 b + (1-b)f_1$, $g_2 = a_2 b + (1-b)f_2$, $g_3 = a_3 b + (1-b)f_3$, $g_4 = -(1-b)f_1$, $g_5 = -(1-b)f_2$, $g_6 = -(1-b)f_3$, $g_7 = (1-b)$, $b = b_1/(b_1 + b_2) \dots \dots \dots (3.11)$

f_1 merupakan vector baris yang menunjukkan pengaruh J_t terhadap Z_t dan f_2 adalah vector baris yang menunjukkan pengaruh P_t terhadap Z_t dan f_3 adalah baris vector yang menunjukkan pengaruh K_t terhadap Z_t . Persamaan 3.10 mencerminkan hubungan jangka pendek atau ketidakseimbangan yang meliputi nilai arah dan kelambanan variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran jalan, pengeluaran listrik, pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan.

Permasalahan utama dalam mengestimasi persamaan 3.10 berkaitan dengan arah variabel (*level of variable*) yang mungkin tidak stasioner. Jika arah variabel tidak stasioner maka estimasi persamaan 3.10 dengan menggunakan OLS (*ordinary Least Square*) atau regresi klasik dapat menyebabkan munculnya regresi lancung atau

spurious regression. Untuk mengatasi masalah tersebut persamaan 3.10 diparameterisasi ulang (*reparameterize*) menjadi :

$$\Delta Y_t = a_1 \Delta J_t + a_2 \Delta P_t + a_3 \Delta K_t + a_4 (Y - \beta_0 - \beta_1 J - \beta_3 P - \beta_4 K)_{t-1} \dots \dots \dots (3.11)$$

Dimana : $a_1 = g_1, a_2 = g_2, a_3 = g_3, \beta_0 = \frac{g_0}{1} - g_7, \beta_1 = g_1 + \frac{g_2}{1} - g_7, \beta_2 = g_2 + \frac{g_5}{-g_7}, \beta_3 = g_3 + \frac{g_6}{1} - g_7$ dan $\Delta X_t = \Delta X_t - \Delta X_{t-1}$

Persamaan 3.11 menjelaskan bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi (ΔY_t) dipengaruhi oleh perubahan pengeluaran jalan (ΔJ_t), perubahan pengeluaran listrik (ΔL_t), perubahan pengeluaran pendidikan (ΔP_t), perubahan pengeluaran kesehatan (ΔK_t) dan kesalahan ketidakseimbangan atau komponen koreksi kesalahan (*error correction component* atau *error correction term*) periode sebelumnya. Jika diamati lebih lanjut akan terlihat bahwa persamaan 3.11 hanya meliputi kelambanan satu periode sehingga ECM ini dikenal sebagai *first order ECM*.

ECM mempunyai cirri khas dengan dimasukkannya unsure *error correction term* (ECT) atau $Y_7(J_{t-1} + P_{t-1} + K_{t-1} - Y_{t-1})$ dalam model. Apabila koefisien ECT signifikan secara statistic dan mempunyai tanda positif maka spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah valid.

Koefisien jangka pendek dari persamaan model *ECM* direfrensikan oleh koefisien β_1 , sedangkan untuk memperoleh koefisien regresi jangka panjang dengan menggunakan model *ECM*, digunakan rumus sebagai berikut : Konstanta = $\beta_0 / \beta_3, X_t = (\beta_2 + \beta_3) / \beta_3$

1. **Error Condition Term (ECT)**

Jika variabel dependen dan variabel independen berkointegrasi maka terdapat hubungan keseimbangan panjang antar variabel tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak menjamin adanya keseimbangan jangka pendek. Oleh karena itu ECT dalam uji kointegrasi dapat digunakan sebagai equilibrium error untuk menentukan perilaku variabel dependen dalam jangka pendek (Gurajati,2003). Untuk regresi dari persamaan ini yaitu dengan menggunakan rumus :

$$DLY_t = a_0 + ECT_{t-1} + a_1 DJ_t + a_2 DP_t + a_3 DK_t + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.12)$$

Untuk persamaan jangka pendek. Sedangkan untuk hubungan jangka panjang (*disequilibrium longrun reationship*) dapat dijelaskan dengan persamaan barikut:

$$LY_t = a_0 + a_1 J_t + a_2 P_t + a_3 K_t + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.13)$$

2. **Penentuan Panjang Lag**

Untuk melakukan uji kointegrasi terlebih dahulu dilakukan uji panjang lag. Penentuan pankang lag atau lag yang di optimum dalam studi ini mengikuti konsep yang dilakukan oleh Schwarz, yaitu dengan memperhatikan besaran *Schward Criterion* yang dihasilkan. Adapun besaran *Schward Criterion* (SC) dirumuskan sebagai berikut (Gurajati,2003) :

$$SC = e^{2k/n} \frac{\sum V_i^2}{n} = e^{2k/n} \frac{RSS}{n} \dots \dots \dots (3.13)$$

Dimana :

RSS : Residual Sum Square

K : Jumlah parameter termasuk intersep

N : jumlah observasi

Untuk kemudahan perhitungan persamaan diatas dapat ditulis sebagai berikut:

$$L_n SC = (2k/n) + \ln (RSS/n) \dots \dots \dots (3.14)$$

Dimana :

$L_n SC$: Logaritma natural dari SC

$2k/n$: *Penalti factor*

Adapun prosedur yang perlu dilakukan adalah menentukan lag optimal untuk X dengan menggunakan autoregresi berturut-turut pada lag 1,2,3...n sehingga harus menentukan lag maksimal, misalnya lah maksimal (n) adalah 5. Dari hasil regresi tersebut diperhatikan SC yang dihasilkan, kemudia dipilih SC yang terkecil sebagai panjang lag optimal. Setelah panjang lag diketahui kemudian dimasukkan variabel Y untuk mengetahui apakah Y berpengaruh terhadap X berturut-turut mulai lag 1,2...n. dari hasil regresi-regresi tersebut dipilih model dengan besaran *Schward* palinag kecil.

3. Pengujian Stasioneritas

Stasioneritas merupakan syarat penting untuk memulai langkah estimasi model persamaan regresi. Secara umum dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang variabelnya tidak stasioner, maka rata-rata dari *variane* sampelnya akan berubah bersama berjalannya waktu. Oleh karena itu dilaukan pengujian terhadap data runtun waktu apakah stasioner atau tidak sebagai salah satu prosedur yang dilakukan. Menurut (Thomas1997,hal.374) dalam (Mudrajat Kuncoro,2004) data stasioner adalah data yang runtun waktu yang tidak mengandung akar-akar unit (*unit roots*). Sebaliknya data yang tidak stasioner yaitu data runtun waktu yang mengandung akar-akar unit. Data runtun waktu dikatakan stasioner jika mean variance dan covariance data tersebut konstan sepanjang waktu.

a. Uji Akar Unit (*Unit Root Test*)

Teori ekonometri berlandaskan asumsi stasioneritas data yang ditunjukkan dengan nilai mean, varian dank ovarian yang konstan untuk semua nilai t. bila regresi dilakukan pada runtun waktu yang tidak stasioner maka dikhawatirkan akan menghasilkan regresi lancng (*spurious regression*). Regresi liner lancng

ditandai dengan nilai R^2 tinggi dan nilai DW yang rendah (Insurkindro,1998). Akibat yang ditimbulkan dari regresi lancung adalah koefisien regresi penaksir tidak efisien, peramalan berdasarkan regresi tersebut akan meleset dari uji baku yang umum untuk koefisien terkait menjadi salah shahih.

Menurut Gurajati (2003) pengujian stasioneritas dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Melakukan *ploting* data
2. Melihat *correlogram autocorrelation fuction*
3. Uji akar-akar unit

Penelitian ini menggunakan uji akar-akar unit untuk melihat stasioneritas data. Uji derajat integrasinya akan dilakukan jika data belum stasioner pada derajat nol. Uji stasioneritas ini t apakah data *tie series* mengandung akar-akar unit. Untuk itu metode yang digunakan adalah uji Philip-Peron Test. Pengujian unit root menggunakan Philip-Peron Test difomulasikan sebagai berikut :

$$\Delta Y_t = \alpha + \beta_{yt-1} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.15)$$

Hipotesis yang digunakan adalah $H_0 : \phi^* = 0$ (data tidak stasioner) dan $H_a : \phi^* \neq 0$ (data stasioner). Jika probabilitas t statistik lebih kecil dari tingkat kepercayaan (5 persen) atau nilai PP hitung lebih negatif dari critical value-nya maka hipotesisi nol ditolak yang berarti data yang diuji stasioner.

b. Uji Derajat Integrasi

Uji ini merupakan kelanjutan dari uji akar unit, apabila setelah dilakukan pengujian akar unit ternyata data belum stasioner, maka pengujian ulang dan menggunakan data nilai perbedaan pertama (*first difference*). Apabila dengan data dari *first defference* belum juga stasioner maka selanjutnya dilakukan pengujian dengan data dari perbedaan kedua (*second difference*) dan seterusnya hingga diperoleh data yang stasioner (Gurajati,1999).

c. Uji Kointegrasi

Setelah melakukan uji stasioneritas maka karakteristik data dapat kita ketahui apakah data yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah data yang stasioner atau tidak. Kointegrasi dapat diartikan sebagai suatu hubungan jangka panjang (*long term relation / equilibrium*) antara variabel-variabel yang tidak stasioner. Keberadaan hubungan kointegrasi memberikan peluang bagi data-data yang secara individual tidak stasioner untuk menghasilkan sebuah kombinasi linier diantara data tersebut sehingga tercipta kondisi yang stasioner. Kointegrasi regresi bermaksud membuktikan terjai kesesuaian dengan teori jangka panjang.

Uji kointegritas kelanjutan dari uji akar dan uji drajat integrasi. Tujuan dilakukannya uji konintegrasi adalah untuk menguji stasioneritas residual regresi kointegrasi. Stasioneritas residual sangat penting jika ingin mengembangkan suatu model dinamis, terutama ECM yang mencakup variabel-variabel kunci pada regresi kointegrasi terkaut. Pada prinsipnya dalam model koreksi kesalahan (ECM) terdapat keseimbangan jangka panjang yang tetap diantara variabel-variabel ekonomi. Jika dalam jangka pendek terdapat ketidakseimbangan dalam satu periode, maka model koreksi kesalahan akan mengoreksi sendiri kesalahan pada periode berikutnya. Mekanisme koreksi kesalahan ini dapat diartikan sebagai penyelaras perilaku jangka pendek dan jangka panjang.

Thomas (1997) menyatakan bahwa hubungan jangka panjang yang unik antara dua variabel runtun waktu dapat terjadi jika :

1. Kedua variabel runtun waktu tersebut stasioner setelah dideferensiasi satu kali
2. Terdapat kombinasi linier antara kedua variabel stasioner tersebut.

3.4.2 Pengujian Model Asumsi Klasik

Secara umum pendekatan ekonometrik perlu dilakukan apa yang disebut sebagai uji asumsi klasik. Tujuannya agar diperoleh penaksiran yang bersifat *Best Linier Unbiased Estimator (BLUE)*, maka terhadap estimasi model penelitian tersebut perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Jarque-Berra (JB)* dan metode grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode JB test yang dilakukan dengan menghitung skewness dan kurtosis, apakah J-B hitung < nilai X^2 (Chi Square) table, maka nilai residual berdistribusi normal.

$$J-B \text{ hitung} = \left[\frac{S^2}{6} + \left(\frac{K-3}{24} \right)^2 \right] \dots \dots \dots (3.16)$$

Dimana :

S = Skewness statistic

K = Kurtosis

Jika nilai J-B hitung > J-B table, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual U_t terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah ada tidaknya suatu hubungan linier yang sempurna atau yang mendekati sempurna antara beberapa variabel atau semua variabel bebas dalam persamaan. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model adalah sebagai berikut :

1. Mengestimasi model awal dalam persamaan sehingga mendapat nilai R^2
2. Menggunakan *Auxiliary Regression* pada masing-masing variabel independen
3. Membandingkan nilai R^2 dalam model persamaan awal dengan R^2 pada model regresi parsial. Jika nilai R^2 dalam regresi parsial lebih tinggi maka terdapat multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedasitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedasitas juga bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi homoskedasitas yaitu variasi residual sama untuk semua pengamatan. Secara ringkas walaupun terdapat heteroskedasitas maka penaksir OLS (*Ordinary Least Square*) tetap tidak bisa dan konsisten tetapi penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (*Asimtotik*). Dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya heteroskedasitas antara lain dengan menggunakan uji *White* dapat menjelaskan apabila nilai probabilitas $\text{abs}^*R\text{-square}$ lebih kecil dari α (5%) maka data bersifat heteroskedasitas begitu pula sebaliknya.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode ke periode sebelumnya ($t-1$). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residu (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada jenis data time series, salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji *Breusch-Godfrey* (BG-test) (Gurajati, 2003). Pengujian ini dilakukan dengan meregresikan variabel pengganggu μ_i dengan menggunakan model autoregressive dengan orde p sebagai berikut :

$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_p U_{t-p} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.17)$$

Dengan H_0 adalah $\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_k = 0$, dimana koefisien autoregressive secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual apabila X^2 tabel lebih besar dibandingkan dengan nilai Obs*R-square, maka model tersebut bebas dari autokorelasi.

3.4.3 Metode Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F)

Uji statistik f menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau :

$$H_0 : \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$$

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan jenis penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau :

$$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_k \neq 0$$

Hipotesis 1

$$H_0 : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = 0 \quad \text{semua variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama}$$

Hipotesis 2

$$H_0 : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \neq 0 \quad \text{semua variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependens secara bersama-sama}$$

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistic F dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut table. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F table, maka H_0 ditolak dan menerima H_1 .

2. Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t)

Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual ini untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Digunakan uji t dengan tingkat keparcayaan 5% dengan hipotesis :

Hipotesis 1 :

$$H_0 : \alpha_1 \leq 0 \quad \text{pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur jalan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara}$$

$H_a : a_1 > 0$ pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur jalan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara

Hipotesis 2 :

$H_0 : a_2 \leq 0$ pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara

$H_a : a_2 > 0$ pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara

Hipotesis 3 :

$H_0 : a_3 \leq 0$ pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai kartanegara

$H_a : a_3 > 0$ pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ketentuan H_0 ditolak bila probabilitas lebih kecil dibandingkan tingkat kepercayaan 5% dan H_0 diterima bila probabilitas lebih besar dibanding tingkat kepercayaan 5%.

3.4.4 Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Gurajati (1995) koefisien determinasi (R^2) merupakan koefisien yang mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan variasi dari variabel independen, dimana nilai R^2 mempunyai rentang nilai 0 sampai dengan 1.

Kelemahan mendasar menggunakan koefisien determinasi adalah biasa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpegaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak penelitian menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan dalam model.

$$R^2 = \sqrt{b}$$

Ketentuan $0 \leq R^2$, jika angka R^2 semakin mendekati 0 maka hubungan tersebut sangat lemah dan sebaliknya jika R^2 semakin mendekati angka 1 maka hubungan tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah suatu wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan ibu kota Kabupaten Tenggarong. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km² (12,89% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur), dengan luas lautan diperkirakan 4.097 km² ($\pm 15\%$). Hal ini menunjukkan adanya potensi sumber daya alam baik didaratan maupun lautan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai kartanegara.

Tabel 4.1

Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jumlah Desa/Kelurahan <i>Number of Villages</i>	Luas (Km2) <i>Area</i>
1	Samboja	23	1 045,90
2	Muara Jawa	8	754,50
3	Sanga-sanga	5	233,40
4	Loa Janan	8	644,20
5	Loa Kulu	15	1 405,70
6	Muara Muntai	13	928,60
7	Muara Wis	7	1 108,16
8	Kota Bangun	21	1 143,74
9	Tenggarong	14	398,10
10	Sebulu	14	859,50
11	Tenggarong Seberang	18	437,00
12	Anggana	8	1 798,80
13	Muara Badak	13	939,09
14	Marang Kayu	11	1 165,71

15	Muara Kaman	20	3 410,10
16	Kenohan	9	1 302,20
17	Kembang Janggut	11	1 923,90

18	Tabang	19	7 764,50
Jumlah		237	27.263,1

Sumber/*Source* : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara/*BPS-Statistics Kutai Kartanegara Regency*

a. Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 626.680 jiwa sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2011 sebesar 648.215 jiwa. Pada tahun 2012 jumlah penduduk tercatat sebanyak 665.489 jiwa). Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencapai 683.131 jiwa. Hal ini berarti jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,2% per tahun yang berasal dari pertumbuhan alamiah dan faktor migrasi penduduk. Pola persebaran penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara menurut luas wilayah sangat timpang yang dapat dilihat dari perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan. Pada pertengahan tahun 2013, kepadatan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 20 jiwa/Km². Kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Tenggarong yaitu sekitar 172 jiwa/Km² dan Kecamatan Tenggarong Seberang yaitu sekitar 112 jiwa/Km². Adapun kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Tabang yaitu sekitar 1 jiwa/Km². Pola penyebaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara ini sebagian besar mengikuti pola transportasi yang ada. Sungai Mahakam merupakan jalur arteri bagi transportasi lokal. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar pemukiman penduduk terkonsentrasi di tepi Sungai Mahakam dan cabang-cabangnya. Daerah-daerah yang relatif jauh dari tepi sungai (belum terdapat prasarana jalan darat) relatif kurang terisi dengan pemukiman penduduk. Sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara tinggal di daerah perdesaan yaitu mencapai 75,7% dari jumlah penduduk dan 24,3% lainnya berada di daerah pusat perkotaan.

4.1.2 Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara

Kondisi Makro ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor, di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti kebanyakan daerah lainnya perekonomiannya masih sangat rentan dengan gejolak ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah Inflasi, tingkat pengangguran, harga minyak dunia dan kebijakan fiskal. Sebagai salah satu instrumen ekonomi, kebijakan fiskal harus mendorong pertumbuhan ekonomi secara sehat, mampu mengendalikan inflasi, mengurangi angka pengangguran neraca

pembayaran, sebagai tujuan utamanya. Mengingat kondisi tahun ini dan tahun-tahun mendatang, fungsi fiskal menjadi salah satu instrumen makro yang sangat penting. Jadi, kalau kebijakan fiskal gagal berarti sangat mungkin kita tidak akan mampu mencapai perbaikan makro ekonomi.

Dilain pihak karakter kebijakan fiskal sangat tidak fleksibel karena setiap kebijakan harus diputuskan melalui konsultasi DPRD bersama-sama pemerintah dalam proses yang cukup lama. Tidak jarang, ketika anggaran fiskal mendapat persetujuan DPRD, menteri atau departemen terkait sudah memberikan disposisi dan ketika dikembalikan ke departemen teknis, persoalannya sudah berubah lagi. Karakter fiskal yang lambat ini sebagai suatu instrumen yang sangat penting ditengah kondisi krisis ini. Kebijakan fiskal melalui APBD yang konservatif seringkali tidak mampu mengakomodasikan persoalan yang besar. Karena itulah, kebijakan fiskal kita ditantang untuk lebih terbuka. Kebijakan fiskal kita dituntut mampu mengantisipasi perubahan yang besar dalam struktur APBD dalam upaya merecovery ekonomi.

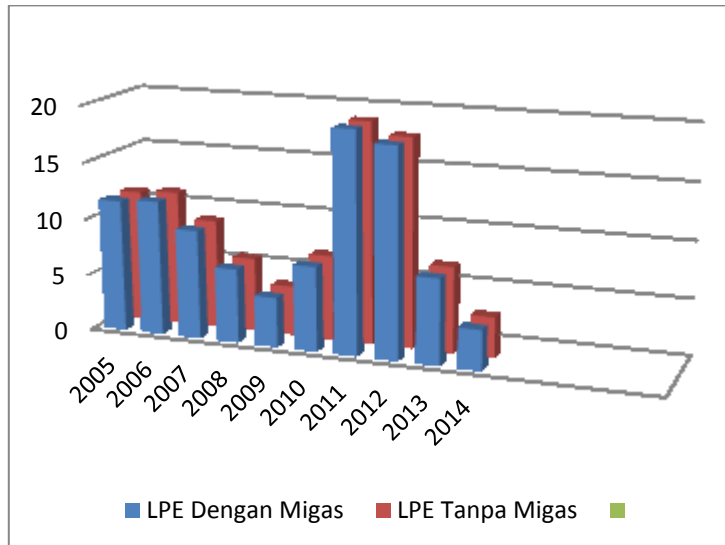
4.2 Deskripsi Variabel

4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Sehingga perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012. Pertumbuhan ekonominya sebesar 3,05 persen di tahun 2012, dan 0,70 persen tahun 2013. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan. Nilai PDRB Kutai Kartanegara tahun 2013 mencapai Rp 129,96 trilyun (mengalami penurunan sebesar 0,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 130,84 trilyun di tahun 2012. Sedangkan jika minyak bumi dan gas alam (migas) dikeluarkan dari penghitungan PDRB, maka nilai PDRB Kutai Kartanegara juga mengalami peningkatan sebesar 7,51 persen. Tahun 2012 PDRB tanpa migas mencapai Rp 66,42 triliun dan meningkat menjadi Rp 69,26 triliun di tahun 2013.

Grafik 4.1

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2014 (Dalam persen)

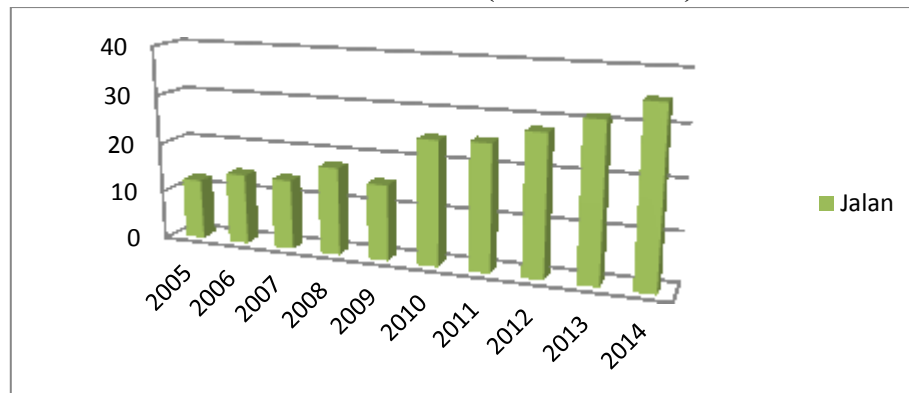


Sumber/Source : BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara/BEPPADA Kutai Kartanegara Regency

4.2.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak Pertumbuhan ekonomi dan bagian integral dari pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya. Penelitian ini membahas sektor infrastruktur Jalan yang merupakan pemenuhan dasar kebutuhan Infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Grafik 4.2
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur Jalan
Tahun 2005-2014 (Dalam Persen)



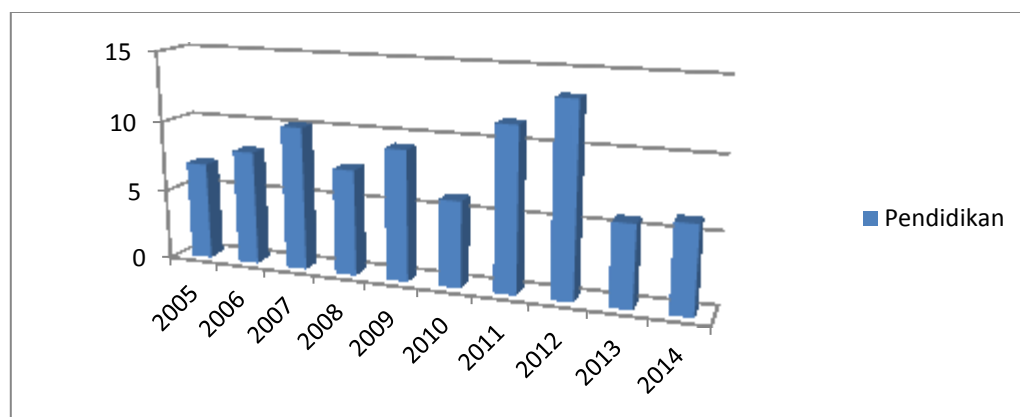
Sumber/Source : BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara/BEPPADA Kutai Kartanegara Regency

Grafik 4.5 Menunjukkan perkembangan pengeluaran bidang infrastruktur jalan yang memiliki tren yang cenderung meningkat dari tahun 2005-2014. Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga mengatasi kesenjangan antar wilayah. Kondisi jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara beragam dari kondisi jalan baik hingga rusak berat. Kondisi jalan baik 61,95 persen (1.575,94 km), dalam kondisi sedang 13,67 persen (347,89 km), dalam kondisi rusak 5,86 persen (5,89 km) dan sisanya jalan dalam kondisi rusak berat 18,52 persen (471,1 km).

4.2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor fundamental bagi suatu daerah. Pendidikan menjadi faktor penentu kualitas sumberdaya manusia yang kemudian akan memberikan kontribusi bagi pembangunan negara atau daerahnya. Sudah seharusnya pemerintah memprioritaskan bidang pendidikan. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk membangun sektor pendidikan dapat terlihat dari pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Perkembangan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada grafik 4.4 dibawah ini.

Grafik 4.3
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan
Tahun 2005-2014 (Dalam Persen)



Sumber/Source : BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara/BAPPEDA Kutai Kartanegara Regency

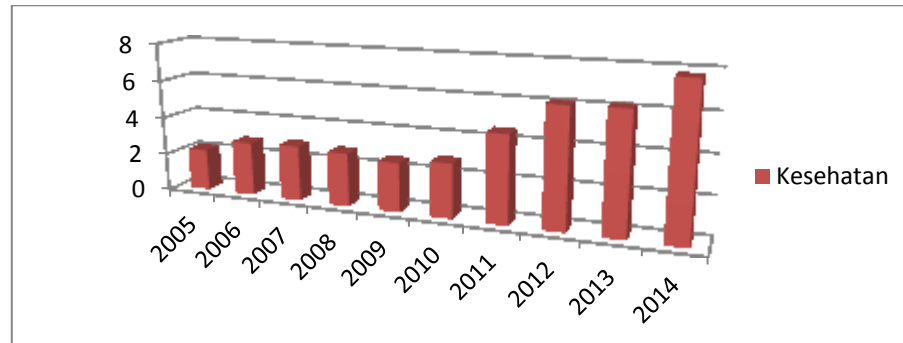
Jika dilihat dari grafik diatas terlihat bahwa sejak tahun 2005-2014 pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki tren yang meningkat dari tahun ke tahun dan memiliki tren konstan pada tahun 2012-2013. Rata-rata perubahan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan hanya berkisar antara 1-3 persen. Pendidikan formal merupakan suatu proses yang berjenjang dari SD hingga perguruan tinggi. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, pendidikan formal yang umumnya diselenggarakan di sekolah-sekolah, tidak hanya dibawah oleh Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) saja, tetapi ada juga yang dibawah oleh Departemen di luar Depdiknas, seperti Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Pertanian, dan lain-lain. Banyaknya sekolah dari tingkat SD hingga SMU/SMK, sejak tahun pembelajaran 2012/2013 hingga 2013/2014 tercatat adanya perubahan. Secara umum sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang berada di bawah Diknas jumlahnya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan yang di luar Diknas. Di tahun 2014, jumlah SD NEGERI di Kutai Kartanegara sebanyak 436 buah, sedangkan SMP NEGERI sebanyak 95 buah, dan SMA NEGERI sebanyak 29 buah. Untuk sekolah swasta, ada 22 SD swasta, 33 SMP swasta, dan 20 SMA swasta. Perbandingan atau rasio antara guru dan murid akan menggambarkan beban yang harus dihadapi seorang guru dalam mengajar. Tenaga pengajar di KutaiKartanegara untuk semua jenjang pendidikan sudah memadai walaupun pada tingkat SD mencatat beban guru relatif lebih berat dibanding jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan semakin tinggi jenjang pendidikan, membutuhkan tenaga pengajar yang menguasai bidang/ilmu pengetahuan yang diajarkan. Rasio murid guru pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di bawah Diknas dalam periode 2011/2012 berkisar antara 7-15, artinya seorang guru dalam mengajar harus menghadapi sekitar 13-15 orang murid. Sedangkan beban yang harus dihadapi oleh seorang guru SLTP adalah 9-13 murid, dan beban yang harus dihadapi guru SMU adalah 6-17 murid.

4.2.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan sarana kesehatan terutama puskesmas dan puskesmas pembantu karena kedua fasilitas tersebut dapat

menjangkau segala lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil. Upaya Pemerintah dalam pelayanan kesehatan tercermin adanya pembangunan sarana kesehatan.

Grafik 4.4
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan
Tahun 2005-2014 (Dalam Persen)



Sumber/Source : BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara/*BAPPEDA Kutai Kartanegara Regency*

Pada tahun 2014 tercatat jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat 3 (tiga) buah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A.M. Parikesit di Kecamatan Tenggarong dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kecamatan Samboja, dan Rumah Sakit Dayaku Raja. Sedangkan jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang telah didirikan di berbagai kecamatan sebanyak 32 dan 173 buah. Jumlah dokter yang melayani di puskesmas sebanyak 69 dokter umum dan 43 dokter gigi.

4.3 Analisa Data

4.3.1 Uji Stasioneritas

Dalam menggunakan metode ECM sebelum melakukan uji kointegrasi, pertama-tama perlu dilakukan uji stasioneritas atau uji akar unit dari data dengan menggunakan *Phillips-Perron test* (PP test), dimana jika nilai probabilitas lebih kecil dari alpha 5 persen maka data tersebut stasioner. Dengan cara yang sama, uji derajat integrasi juga akan dilakukan jika data ternyata belum stasioner pada level. Hasil uji akar unit dan uji derajat integrasi dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Hasil Uji Akar Unit dan Uji Derajat Integrasi dengan Uji PP

Variabel	Level		1 ST Difference		2 ST Difference	
	Prob.	Bandwith	Prob.	Bandwith	Prob.	Bandwith
PDRB Dengan Migas	0.2884	2.0	0.0001	0.0	0.0001	1.0
Jalan	0.9812	0.0	0.0115	2.0	0.0001	6.0
Pendidikan	0.4909	8.0	0.0003	7.0	0.0001	6.0
Kesehatan	0.9995	5.0	0.2089	1.0	0.0082	6.0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8, Lampiran 1

Pada tabel 4.2 di atas nampak bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang, jalan, pendidikan, kesehatan dan PDRB belum stasioner dalam level, kemudian dilakukan uji derajat integrasi ke-1 (1ST Difference). Hasil uji derajat integrasi tingkat pertama terlihat bahwa tiga variabel yang pada 1ST Difference sudah stasioner namun variabel PDB dan pengeluaran pemerintah atas pendidikan belum stasioner, untuk itu diperlukan uji derajat integrasi tingkat kedua. Hasil uji derajat integrasi ke-2 (2ST Difference) terlihat bahwa semua variabel yang diambil dalam penelitian ini telah stasioner.

Apabila derajat kombinasi linier dari variabel-variabel tersebut stasioner, maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut berkointegrasi. Untuk mengetahui hubungan kointegrasi tersebut, maka dilakukan uji kointegrasi.

4.3.2 Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa semua variabel yang digunakan dalam model memiliki derajat integrasi yang sama. Dari hasil pengujian seluruh data dalam penelitian ini memiliki derajat integrasi yang sama, yaitu berintegrasi. Oleh karena itu maka uji kointegrasi dapat dilakukan. Berikut ini akan disajikan hasil uji kointegrasi dari data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *residual based test* dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Hasil Uji Kointegrasi

		Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic		-4.241574	0.0127*
Test critical values:	1% level	-4.420595	
	5% level	-3.259808	
	10% level	-2.771129	

Keterangan : * Terkointegrasi

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8, Lampiran 2

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa kointegrasi antara variabel-variabel yang akan dipakai dalam penelitian ini. hal tersebut dapat dibuktikan melalui tingkat signifikansi probabilitas lebih kecil dari nilai kritis 5 persen. Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat nilai T-Stat yang lebih besar dari *Critical Values*, sehingga data terkointegrasi. Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini saling berkointegrasi. Oleh sebab itu model ini lolos dari uji kointegrasi maka *Error Correction Model* dapat digunakan dalam penelitian.

4.3.3 Hasil Estimasi Model Jangka Panjang

Setelah diketahui bahwa variabel dependen dan variabel independen saling berkointegrasi, yang berarti terdapat keseimbangan dalam jangka panjang antar variabel tersebut. Ringkasan hasil estimasi koefisien jangka panjang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Ringkasan Hasil Estimasi Model Jangka Panjang
Metode Error Correction Model (ECM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
JALAN	0.012222	0.140817	-0.086794	0.9337
PENDIDIKAN	0.066604	0.178236	0.373682	0.7215
KESEHATAN	0.338422	0.576745	-0.586780	0.5787
C	3.615927	2.193611	1.648391	0.1504
R-squared	0.352724			
F-statistic	1.089874			
Prob(F-statistic)	0.422560			

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8, Lampiran 3

4.3.3.1 Pengujian Asumsi Klasik Model Jangka Panjang

1. Uji Normalitas

Ringkasan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Jarque Bera* dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Uji Jarque-Bera Model Jangka Panjang

J-B hitung	Prob
0.421711	0.809891

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8, Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas J-B hitung persamaan lebih besar dari alpha 0.05 yang berarti bahwa residual uji terdistribusi normal. Dalam penelitian ini tetap bersifat BLUE (*Best Liniear biased Estimator*) karena faktor jumlah observasi yang kurang panjang yaitu hanya 10 tahun sehingga kemungkinan data terdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedasitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan Uji *White Heteroscedasticity-Consistent Standar Error and Covarian*. Dari tabel white diketahui bahwa *Obs*Rsquared* sebesar $0.5714 > \alpha 0.05$ maka H_0 diterima, H_1 ditolak.. Dari perbandingan ini dengan tingkat keyakinan 90% dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedasitas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.6
Heteroskedasticity Test : White

F-statistic	0.501580	Probability	0.6949
Obs*R-squared	2.005051	Probability	0.5714

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8, Lampiran 5

3. Uji Autokorelasi

Tabel 4.7
Uji Breusch-Godfrey Serrial Correlation

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.558377	Probability	0.6111
Obs*R-squared	2.182543	Probability	0.3358

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8, Lampiran 6

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa probabilitas *Obs*R-squared* 0.3358 lebih besar dari alpha 0,05 maka H_0 diterima H_1 ditolak dapat disimpulkan bahwa tidak adanya masalah autokorelasi dalam model regresi ini.

4. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Jika koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari alpha 0.05 persen berarti terjadi multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8
Auxilliary Regression Model Jangka Panjang

Regresi	R ²
Regresi Utama	0.352724
Regresi Parsial Jalan	0.859356
Regresi Parsial Pendidikan	0.123059
Regresi Parsial Kesehatan	0.858036

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan Eviews 8, Lampiran 7

Dari tabel diatas variabel pengeluaran pemerintah bidang jalan dan kesehatan memiliki R² regresi parsial lebih besar daripada R² regresi utama sedangkan variabel pendidikan memiliki R² regresi parsialnya lebih kecil. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

4.3.3.2 Uji Statistik Analisis Regresi Jangka Panjang

Pengujian koefisien regresi secara individual (uji t) dilihat dari signifikansi t-statistik. Uji t bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Parameter suatu variabel dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau dapat juga dilihat dari nilai probabilitas tstatistik yang lebih kecil dari alpha 1 persen, 5 persen atau 10 persen.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa hanya varibel pengeluaran pemerintah sektor jalan, pendidikan dan kesehatan tidak signifikan dalam model ini, karena nilai probabilitasnya lebih besar dari alpha 5 persen. Variabel jalan, kesehatan memiliki koefisien yang negatif sedangkan variabel pendidikan positif. Sehingga setiap kenaikan dari ketiga variabel tersebut tidak mempengaruhi PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara keseluruhan hal ini memiliki arti bahwa setiap penambahan yang terjadi pada pengeluaran pemerintah sektor jalan, pendidikan dan kesehatan tidak terlalu mempengaruhi PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara di bidang infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini disebabkan karena waktu observasi yang pendek dari penelitian ini yaitu hanya 2 periode saja (10 tahun).

a. Uji Signifikansi Parameter (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Jika nilai F hitung lebih besar dibandingkan nilai F tabel atau jika nilai probabilitas F-stat lebih kecil dari alpha 5 persen berarti bahwa secara bersama-sama variabel yang terdapat dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa variabel independen pengeluaran pemerintah bidang jalan, pendidikan, dan kesehatan secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 1.089874 F tabel sebesar 0.935417 yang berarti lebih besar dari alpha 5 persen. Dari pembuktian tersebut, maka model jangka panjang dalam penelitian ini tidak digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara atau dengan kata lain secara keseluruhan variabel independennya tidak mampu menerangkan variabel dependen secara signifikan dalam jangka panjang.

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil koefisien determinasi dari model menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0.352724. Hal ini berarti sebesar 35.27% variasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara bisa dijelaskan dari variasi ke tiga variabel independen. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.3.4 Hasil Estimasi Model Regresi Jangka Pendek

Setelah mengetahui hasil estimasi jangka panjang, maka perlu diketahui bagaimana hasil estimasi model regresi jangka pendek. Model regresi jangka pendek dalam penelitian ini menggunakan differensi pertama dan menggunakan variabel *Error Correction Term* (ECT).

Tabel 4.9

Ringkasan Hasil Estimasi Model Jangka pendek
Metode Error Correction Term (ECT)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(JALAN)	1.041032	0.156784	0.453056	0.0240*
D(PENDIDIKAN)	0.071432	0.202145	0.204962	0.0576
D(KESEHATAN)	0.270362	0.602741	0.448553	0.6770
Error Correction Term	0.576704	0.462858	1.245962	0.0308*
C	5.626375	2.851668	1.973012	0.1198
R-squared	0.552960			
F-statistic	1.236938			
Prob(F-statistic)	0.020857*			

Keterangan : * Signifikan pada alpha 5 persen

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8, Lampiran 8

Pada tampilan tabel 4.8 diatas perhatikan signifikan Error Corecction Term. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari alpha 0.05 persen, ini menunjukkan bahwa model koreksi kesalahan (ECM) yang digunakan sudah valid.

4.3.4.1 Pengujian Asumsi Klasik Model Jangka Pendek

1. Uji Normalitas

Ringkasan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Jarque Bera* dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.10
Uji Jarque-Berra Model Jangka Pendek

J-B hitung	Prob
0.538737	0.763862

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8, Lampiran 9

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas J-B hitung persamaan lebih besar dari alpha 0.05 yang berarti bahwa residual u_t terdistribusi normal. Dalam penelitian ini tetap bersifat BLUE (*Best Liniear biased Estimator*) karena faktor jumlah observasi yang kurang panjang yaitu hanya 10 tahun sehingga kemungkinan data terdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedasitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan Uji *White Heteroscedasticity*. Dari tabel white diketahui bahwa $Obs*Rsquared$ sebesar 2.123553 sedangkan F-stat tabel nilainya 0.308815. Dari perbandingan ini

persamaan yang dipakai dalam penelitian diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedasitas.

Tabel 4.11
Heteroskedasticity Test : White

F-statistic	0.308815	Probability	0.8593
Obs*R-squared	3.108037	Probability	0.7130

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8, Lampiran 10

3. Uji Autokorelasi

Tabel 4.12
Uji Breusch-Godfrey Serrial Correlation

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.282074	Probability	0.7800
Obs*R-squared	1.980123	Probability	0.3716

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8, Lampiran 11

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa probabilitas *Obs*R-squared* sebesar 0.1316 lebih besar dari alpha 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya masalah autokorelasi dalam model jangka pendek.

4. Uji Multikolinearitas

Auxilliary Regression digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas. Jika nilai R^2 regresi utama lebih tinggi daripada nilai R^2 regresi parsial, maka dikatakan tidak terdapat multikolineritas. Hasil uji multikolinearitas menggunakan *Auxilliary Regression* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.13
Auxilliary Regression Model Jangka Pendek

Regresi	R^2
Regresi Utama	0.552960
Regresi Parsial Jalan	0.858161
Regresi Parsial Pendidikan	0.261512
Regresi Parsial Kesehatan	0.847992
Regresi Parsial ECT	0.181740

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8, Lampiran 12

Dari tabel 4.9 diatas terlihat bahwa variabel jalan dan kesehatan memiliki R^2 regresi parsial lebih besar daripada R^2 regresi utama sedangkan variabel lain memiliki R^2 regresi parsialnya lebih kecil. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

4.3.4.2 Uji Statistik Analisis Regresi Jangka Pendek

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa untuk persamaan yang diambil dalam penelitian ini dalam jangka pendek, differensi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah bidang jalan (J) signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui PDRB pada tingkat kepercayaan 5 persen. Hal ini terlihat dari probabilitas t-statistik dari variabel tersebut yang lebih kecil dari alpha 5 persen, dimana probabilitas t-statistik (D(J)) sebesar 0.0240. Dan variabel lain differensi pertama pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (D(P)) dan kesehatan (D(K)) tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. Dapat dilihat dalam tabel diatas probabilitas t-statistik variabel pendidikan nilainya 0.0576 dan variabel kesehatan 0.6670 dimana nilai tersebut lebih

nilai tersebut lebih besar dari tingkat kepercayaan pada tingkat kepercayaan 5 persen. Dapat juga dilihat dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabelnya.

Differensi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah bidang jalan signifikan pada alpha 5 persen. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sektor jalan sebesar satu milyar rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 0.041032. Sedangkan differensi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana nilai koefisiennya dan probabilitasnya lebih besar dari pada alpha 5 persen.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koefisien *error correction term* (ECT) untuk persamaan yang diambil menghasilkan tanda yang diharapkan, yaitu bertanda positif dan secara statistik probabilitas signifikan pada alpha 5 persen, dimana nilai koefisiennya positif 0.576704. Hal tersebut mempunyai makna bahwa kecepatan penyesuaian (*speed of adjustment*) variabel pengeluaran pemerintah sektor jalan adalah sebesar 57.67 persen dan akan disesuaikan dalam waktu satu tahun.

a. Uji Signifikansi Parameter (uji F)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa differensi pertama dari variabel independen (pengeluaran pemerintah bidang jalan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai kartanegara dalam jangka pendek. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas F-statistik yaitu sektor jalan 0.0240 yang lebih kecil dari alpha 5 persen.

b. Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi dari model menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0.552960. Hal ini berarti 55.29% variasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara bisa dijelaskan dari variasi ke tiga variabel independen. Sedangkan sisanya 44.71% dijelaskan oleh variable lain diluar model.

4.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Dari data yang diperoleh dilakukan pengolahan data menggunakan *Error Correction Model* untuk mengetahui perilaku jangka pendek maupun perilaku jangka panjang dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. Variabel dependen yang digunakan adalah Pertumbuhan ekonomi yang dilambangkan dari PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah sektor jalan, pendidikan, dan kesehatan.

Dari ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, variabel pengeluaran pemerintah sektor jalan signifikan dalam jangka pendek. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan tidak signifikan, hal tersebut terlihat dari probabilitas signifikansi yang lebih besar dari alpha 5 persen. Sehingga dalam penelitian ini variabel PDRB dalam jangka pendek hanya dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah sentor jalan. Dengan persamaan matematis sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccccccc} DY = 5.626375 & + & 1.041032DJ & + & 0.071432 DP & + & 0.270362 DK \\ & & (0.1198) & & (0.0240)* & & (0.0576) & & (0.6770) \\ & & 0.576704ECT & & & & & & \\ & & (0.0308*) & & & & & & \end{array}$$

Keterangan: * : signifikan pada alpha 5 persen.

DY : Differensiasi pertama dari variabel PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara

DJ : Differensiasi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastrukturn jalan

DP : Differensiasi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan

DK : Differensiasi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan

ECT : *Error Correction Term*

Penjelasan Persamaan Matematis Jangka Pendek :

1. + 1.041032DJ Hal ini dimaksudkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur sebesar satu milyar rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 1.041032 milyar rupiah dengan tingkat signifikan sebesar 0.0240* persen.
2. + 0.071432DP Hal ini dimaksudkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar satu milyar rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 0.071432 milyar rupiah dengan tingkat tidak signifikan sebesar 0.0576 persen.
3. + 0.270362DK Hal ini dimaksudkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar satu milyar rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 0.270362 milyar rupiah dengan tingkat tidak signifikan sebesar 0.6770 persen.
4. 0.576704ECT Hal ini dimaksudkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sebesar satu milyar rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 0.576704 milyar rupiah pada tahun sebelumnya ($t-1$) dengan tingkat signifikan sebesar 0.0308* persen.

Sedangkan dalam jangka panjang, variabel pengeluaran pemerintah sektor jalan, pendidikan dan kesehatan tidak signifikan terhadap variabel dependen PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara karena memiliki probabilitas signifikan yang lebih besar dari alpha 5 persen. Sehingga dalam penelitian ini variabel PDRB dalam jangka panjang tidak dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah sektor jalan, pendidikan dan kesehatan. Berikut ini adalah persamaan matematis penelitian :

$$Y = 3.615927 + 0.012222J + 0.066604P + 0.338422K$$

(0.1504) (0.9337) (0.7215) (0.5787)

Y : Differensiasi pertama dari variabel PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara

J : Differensiasi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur jalan

P : Differensiasi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan

K : Differensiasi pertama dari variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan

Penjelasan Persamaan Matematis Jangka Panjang :

1. + 0.012222J Hal ini dimaksudkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar satu milyar rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 0.012222 milyar rupiah dengan tingkat tidak signifikan sebesar 0.9337 persen.
2. + 0.066604P Hal ini dimaksudkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar satu milyar rupiah akan meningkatkan

PDRB sebesar 0.066604 milyar rupiah dengan tingkat tidak signifikan sebesar 0.7215 persen.

3. + 0.338422K Hal ini dimaksudkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar satu milyar rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 0.338422 milyar rupiah dengan tingkat tidak signifikan sebesar 0.5787 persen.

4.4.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara

Variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur jalan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut terlihat dari probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari alpha 5 persen. Hal tersebut menunjukkan hubungannya sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian, dimana pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi hasil penelitian menunjukkan kesesuaian teori.

Infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi suatu daerah dapat terwujud. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan mampu melakukan pemerataan pembangunan pasti dapat melakukan pembangunan infrastruktur keseluruhan bagian wilayahnya. Penelitian yang dilakukan World Bank (2004) mengemukakan bahwa tingginya investasi disebabkan oleh tingginya ketersediaan infrastruktur sehingga integrasi ekonomi terwujud dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Temuan hasil ini dikarenakan proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam arti lain adanya ketepatan pengelolaan dan realisasi anggaran untuk infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Proyek-proyek penyediaan infrastruktur jalan yang dibiayai dari anggaran pemerintah bagi masyarakat yang berlangsung selama 10 tahun mampu mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi dengan tersedianya infrastruktur jalan yang baik. Hal ini akan berimbas pada percepatan pengaruh sektor-sektor ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.

4.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara

Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak signifikan mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara, karena

memiliki probabilitas t statistik yang lebih besar dari alpha 5 persen. Hasil tersebut bermakna bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian, dimana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi hasil penelitian tidak menunjukkan kesesuaian teori dimana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan seharusnya berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menurut teori human capital bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dapat meningkatkan kualitas penduduk kemudian selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penelitian ini hasilnya berkebalikan dengan teori yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang dikemukakan oleh Ari Widodo (2010) dalam penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah sektor publik dalam hal ini pendidikan, tidak dapat berdiri sendiri sebagai variabel independen. Variabel pengeluaran pemerintah harus berinteraksi dengan variabel lain. Periode penelitian yang hanya 10 tahun belum dapat mengakomodir pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, adanya kepentingan politik dan tidak tetapnya sasaran dalam pengelolaan dan realisasi anggaran untuk pembangunan gedung adalah salah satu penyebab pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan belum mampu menjelaskan secara signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang akan menghasilkan perbaikan di bidang pendidikan tidak dapat secara cepat mengubah kualitas angkatan kerja yang kemudian meningkatkan produktifitas kerja. Setelah itu produktifitas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Josaphat P Kweka dan Oliver Morrissey (1999) dalam Luki Alfirman (2006) di Tanzania Hasil yang diperoleh bahwa pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap pertumbuhan Dampak negatif disebabkan karena tidak efisiennya pengeluaran pemerintah di Tanzania. Jurnal penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa di negara miskin dan negara sedang berkembang memiliki kecenderungan pengeluaran pada sektor publik seperti pendidikan bersifat konsumtif. Seharusnya menurut Todaro (2003) pengeluaran pemerintah yang ditujukan sebagai perbaikan modal manusia pada dasarnya merupakan suatu investasi. Sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.4.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara

Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki arah hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak signifikan, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini dimana pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi hasil penelitian tidak menunjukkan kesesuaian teori dimana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan seharusnya berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinegara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memang belum dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena proses perbaikan kesehatan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah tersebut tidak dapat langsung terlihat pengaruhnya. Terdapat tenggang waktu ketika pemerintah mengeluarkan sejumlah anggaran pembangunan untuk kesehatan hingga kualitas kesehatan masyarakat meningkat dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki arah hubungan yang negatif, hal tersebut terlihat dari probabilitas t-statistik yang lebih besar dari alpha 5 persen. Berarti pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memerlukan waktu lebih lama untuk dapat secara langsung mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil temuan tersebut dikarenakan rendahnya keefektifan anggaran pemerintah dalam realisasi dan tidak tetapnya sasaran dalam realisasi anggaran untuk jaminan kesehatan sehingga pengeluaran di bidang kesehatan belum dapat mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara, faktor lain yang menyebabkan tidak signifikannya pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan adalah tidak adanya variabel moderating yang dapat mengakomodir masalah-masalah tersebut dan waktu observasi yang singkat yang hanya 10 tahun belum mampu menjelaskan secara signifikan mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil temuan pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Donald N dan Shuanglin (1993) pada 58 negara Asia dan Afrika. Pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan atau dalam kaitannya dengan kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penjelasan dalam

penelitian tersebut menyebutkan untuk negara miskin dan sedang berkembang sifat pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat investasi sehingga pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak dapat langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur jalan menunjukkan nilai yang signifikan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak signifikan dan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak signifikan dan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah banyaknya variabel yang tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Variabel independen yang ada dalam penelitian ini tidak dapat langsung mempengaruhi variabel dependennya, maka diperlukan adanya variabel moderating dan intervening untuk mengakomodir masalah pengaruh tersebut. Variabel-variabel tersebut misalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka melek huruf dan indikator-indikator lain dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Diharapkan penelitian selanjutnya mampu memperbaiki keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang didapat, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor jalan signifikan dalam jangka pendek. Perlu ditingkatkan investasi swasta pada sektor infrastruktur jalan sehingga dapat membantu pemerintah untuk menyediakan fasilitas jalan yang baik bagi masyarakat.
2. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh variabel lain persen pada jangka panjang dan persen pada jangka pendek, maka dalam model pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara masih terbuka untuk dikembangkan dengan menambahkan variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Dabe, Suleiman and Aamer S, 2003. .Government Expenditure, Military Spending and Economic Growth : Causality Evidence from Egypt, Israel and Syria. <http://ssrn.org/-163>. Diakses tanggal 5 Oktober 2009.
- Adi Widodo, 2010. . Analisis Pengaruh Sektor Publik di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia.. Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro
- Anggito Abimanyu, (Eds).2009, *Era Baru Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Kompas
- Anton Hermanto Gunawan. 1991. *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Baum, Donald N and Shuanglin Lin. 1993. .The Differential Effects on Economic Growth of Government Expenditure on Education, Welfare, and Defense. *Journal of Economic Development*, Vol 18 No.1 h.175-185
- Deni Friawan. 2008, .Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. CSIS Vol.37. No.2 Juni 2008. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Dumairy 1999, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta Estache, Antonio dkk. 2007. .Growth Effects of Public Expenditure on the State and Local Level: Evidence From a Sample of Rich Government.. World Bank Policy Research Working Paper 4219. <http://ssrn.org/id981827>. Diakses tanggal 5 Oktober 2009.
- Firmansyah. 2009. .Modul praktek Regresi Data Panel dengan Eviews6., Modul disajikan dalam Seri 13 Pelatihan LSKE FE Universitas Diponegoro, Semarang 29 Mei 2009
- Frans, Sena. 2009. dalam *Era Baru Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Kompas
- Gujarati,Damodar. N. 2003, *Basic Econometric Fourt Edition*. New York : The McGraw-Hill Compaies Inc
- Guritno Mangkoesoebroto, 1997, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta
- Insukindro,1992, .Pembentukan Model Dalam Penelitian Ekonomi.. Jurnal eknomi dan Bisnis Indonesia, No.1, tahun VII,BPFE-UGM
- Jamzoni Sodik. 2007. .Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia.. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 , No. 1, h.27-36 Universitas Islam Indonesia
- Lipsey, Richard G. !992. *Pengantra Makro Ekonomi Edisi 8*. Jakarta: Erlangga

- Luki Alfirman dan Edy Sutirno. 2006. *Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression*. Jurnal Keuangan Publik, Vol.4, No.2 h.25-66. Jakarta
- Mankiw, N. Gregory, 2003, *Teori Makro Ekonomi, Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga
- Mudrajat, Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan ekonomi*, Yogyakarta :UPP AMP YKPN.
- Musgrave, Richard A.1993. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, Jakarta: Erlangga
- Nopirin, 1990, *Ekonomi Moneter: Buku 1&2 BPFE*, Yogyakarta
- Nicholson ,Walter .2002.*Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya Edisi Delapan*. Jakarta: Erlangga
- Saez Marta Pascual and Santiago Álvarez-García,2006. . Government Spending And Economic Growth In The European Union Countries :An empirical Approach.. JEL, <http://ssrn.org/-id14104>. Diakses tanggal 5 Oktober 2009.
- Samuelson, Paul A.,William D Nordhaus. 2005.*Pengantar Teori Ekonomi Edisi 11*. Jakarta: Erlangga
- Sardono Sukirno, 1996, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soediyono,1992,*Ekonomi Makro:Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Edisi kelima, Liberty: Yogyakarta.
- Sri Isnowati. 2002. .Error Correction Model (ECM) Sebagai Salah Satu Bentuk Pemilihan Model dalam Ekonometri.. Fokus Ekonomi, Vol.1, Agustus 2002 Hal 182-194
- Tri Haryanto, Unggul H dan Achmad Solihin. 2005. .Pengeluaran Pemerintah dan Kinerja Sektor Pendidikan serta Kesehatan di Jawa Timur.. Majalah Ekonomi, Tahun XIV No.2, 2 Agustus 2005, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Suparmoko, 19994, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi keempat BPFE, Yogyakarta